



BPK Ingatkan agar Bupati-Walikota Transparan

PONTIANAK. Banyak kasus akibat tak transparannya pendataan keuangan, membuat beberapa pejabat harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi di Kalbar.

"Banyak contoh akibat itu yang kemudian BPK melimpahkan kepada kejaksaan. Tapi saya yakin Kalbar tidak seperti itu," kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Hadi Poernomo, saat Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK RI dengan 14 Kabupaten/Kota se-Kalbar mengenai pengembangan dan pengelolaan informasi untuk akses data dalam rangka pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Kamis (16/6) di Kantor BPK Kalbar.

Karena itu, dia berharap dengan adanya MoU ini seluruh daerah dapat memberikan data keuangan dengan jelas transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Hal tersebut mengingatkan tidak transparannya pemberian data kepada BPK RI sudah banyak dilakukan beberapa perangkat daerah di beberapa Provinsi yang berakhir ke meja hijau.

Hadi Poernomo menambahkan, sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 bahwa merupakan kewenangan BPK RI dalam melakukan pemeriksaan dan pengelolaan keuangan Negara terhadap seluruh Provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

"BPK memiliki hak dalam meminta pendataan, dan kami

harap kepada seluruh Bupati dan Walikota memberikan data yang sesuai dilapangan agar proses pemeriksaan menjadi lancar. Seperti lagu, proses pemberian data kepada BPK seperti lagu Jangan Ada Dusta Diantara Kita," ujarnya.

Gubernur Kalbar menurut Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, MoU keuangan Negara yang dilakukan seluruh Kabupaten/Kota se-Kalbar ini merupakan kepentingan Negara dalam rangka pembenahan system keuangan agar berjalan sesuai dengan UU yang berlaku.

"Terhadap penilaian yang dilakukan untuk Kalbar beberapa tahun belakangan yaitu Disclaimer Opinion, merupakan pembelajaran akibat tidak disp-

lin dalam melakukan pendataan keuangan. Jangan sampai kedepan keuangan Kalbar mendapat penilaian yang demikian," harap orang nomor satu di Bumi Khatulistiwa ini.

Selain itu, mantan Bupati Landak ini mengungkapkan, pemerintah pusat berhak dan memiliki kewenangan dalam mengontrol segala peraturan yang harus ditetapkan di seluruh Provinsi, termasuk dalam menetapkan keputusan pemekaran.

"Pusat punya hak untuk mengontrol, karena kita ini bukan Negara dalam Negara melainkan sebuah Provinsi yang segala keputusan tetap ada peraturan yang dibuat oleh pusat," tuntas Cornelis yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar ini. (jul)